



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

PERMENKUMHAM NO. 22 Tahun 2021 KRITERIA DAERAH KABUPATEN/KOTA PEDULI HAM

Salatiga, 1 Februari 2024



Jateng
gayeng

ALWAYS THE BEST

REFORMASI
HUKUM

icare

PASTI Nyata

e! gov
PASTI Nyata

GAMBARAN UMUM KKP HAM



KKP HAM

DASAR HUKUM

Permenkumham No.22 Tahun 2021 Tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia

TUJUAN

1. Memotivasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM (P5HAM);
2. Mengembangkan sinergisitas satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical dalam rangka P5 HAM;
3. Memberikan penilaian terhadap stuktur, proses dan hasil capaian kinerja Kabupaten/Kota dalam rangka P5HAM.

SASARAN

35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

PENILAIAN KKP HAM

Penilaian KKP HAM di tahun 2024 adalah capaian kinerja pemerintah daerah pada tahun 2023



PELAKSANAAN DAN PENILAIAN KKP HAM



Jateng
gayeng

ALWAYS THE BEST

REFORMASI
HUKUM

icare

PASTI Nyata

ei gov
PASTI Nyata

TUGAS DAN WEWENANG TIM PENILAI

Memberikan penilaian berdasarkan kriteria yang telah diatur di dalam Permenkumham 22/2021 tentang KKP HAM



Pengurangan nilai tidak lebih dari 50 (lima puluh)



Menambahkan nilai pelaksanaan KKP HAM berdasarkan capaian Implementasi Aksi HAM tahun sebelumnya



Mengurangi nilai pelaksanaan KKP HAM berdasarkan peninjauan lapangan oleh Tim penilai



Mengurangi nilai pelaksanaan KKP HAM berdasarkan tidak melaksanakan tindak lanjut penyelesaian pelanggaran HAM dan/atau tidak adanya kejelasan proses penyelesaian dugaan pelanggaran HAM di daerah tersebut.



Jateng
gayeng

ALWAYS THE BEST

REFORMASI
HUKUM

icare

PASTI Nyata

ei.gov
PASTI Nyata

TEKNIS PENILAIAN KKPHAM



Tim Penilai menelaah isu aktual yang ditemukan



Pengurangan nilai dapat dilakukan apabila sekiranya memang kasus tersebut berdampak luas/sedang



Setelah analisa pengurangan nilai disepakati antar tim penilai, hasilnya akan diserahkan kepada Dirjen HAM



Dirjen HAM dapat menerima/menolak rekomendasi pengurangan nilai dari Tim Penilai

INDIKATOR KKP HAM

Setiap aspek P5HAM memiliki masing masing indikator yang menggambarkan pelaksanaan hak dari sisi struktur, proses dan hasil dengan jumlah 120 indikator, Penjabaran dari setiap indikator dijelaskan dalam lampiran I peraturan menteri Hukum dan HAM No. 22 Tahun 2021, yaitu;

INDIKATOR STRUKTUR

Indikator yang terkait dengan keberadaan Peraturan perundangundangan yang menjamin pelaksanaan HAM, tergambar dari adanya produk hukum daerah dalam bentuk Perda, Perbup/Perwal maupun paeraturan/kebijakan daerah lainnya

INDIKATOR PROSES

Perwujudan dari indikator struktur yaitu upaya lebih teknis terkait pelaksanaan HAM seperti Program, Kegiatan, aksi, alokasi anggaran, sarana dan prasarana, maupun intervensi lainnya

INDIKATOR HASIL

Indikator yang menggambarkan dampak dari setiap intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah, yang memastikan agar intervensi tersebut benar-benar memberikan pengaruh/perubahan bagi pemajuan HAM di masyarakat. Capaian indikator hasil dapat dilihat dalam jangka menengah dan panjang.

KENDALA CAPAIAN KKP HAM

Kendala Substansi

Berdasarkan temuan, capaian KKP HAM Kab/Kota dipengaruhi oleh:

1. Dukungan Kepala Daerah;
2. Penganggaran Kab/Kota;
3. Produk Hukum Pemda;
4. Belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
5. Terdapat indikator-indikator baru pada Permenkumham 22/2021 terutama dari kelompok hak sipil dan politik, sehingga banyak pemda yang belum memahami substansi dari indikator tersebut.



Kendala Teknis

1. Rotasi pejabat/SDM yang menangani pelaporan KKP HAM, sehingga penggantinya harus memulai dari awal dalam memahami KKP HAM;
2. Kurangnya jumlah SDM Kantor Wilayah Kemenkumham yang menangani KKP HAM untuk memberikan supervisi.

Kendala Non-Teknis

1. Pandemi Covid-19 membuat Kab/Kota melakukan realokasi anggaran, sehingga Bagian Hukum Kab/Kota tidak dapat maksimal menjemput data ke OPD-OPD yang bertanggung jawab pada capaian KKP HAM;
2. Bencana alam yang tidak terduga.

STRATEGI

- Bagian Hukum sebagai koordinator dapat mempersiapkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan melibatkan OPD yang mengampu tugas dan fungsi masing-masing kriteria;
- Koordinator melakukan rapat secara intensif dengan OPD yang terlibat;
- Koordinator melakukan koordinasi dengan Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi dan Kantor Wilayah apabila ada kendala dalam pemenuhan data dukung;
- Koordinator diharapkan selalu hadir dalam kegiatan rapat persiapan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah baik yang dilaksanakan secara daring atau pun luring.



OPD TERKAIT KKP HAM

NO	KRITERIA	OPD PEMPRAKARSA	OPD TERKAIT
1	Hak atas bantuan hukum	Bagian Hukum Kab/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda Kab/Kota 2. Kepolisian 3. Pengadilan 4. Dinas Sosial Kab/Kota 5. DP3AKB
2	Ha atas informasi	Bagian Hukum Kab/Kota	Dinas Kominfo
3	Hak turut serta dalam pemerintahan	DP3AKB Kab/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Hukum Kab/Kota 2. Bappeda Kab/Kota 3. Dinas Sosial Kab/Kota 4. Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota
4	Hak katas keberagaman dan pluralisme	Kesbangpol Kab/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Hukum Kab/Kota 2. Bappeda Kab/Kota 3. Ombudsman/Inspektorat
5	Hak atas kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Hukum Kab/Kota 2. Pengadilan Agama 3. Pengadilan Negeri



OPD TERKAIT KKP HAM

6	Hak atas Kesehatan	Dinas Kesehatan Kab/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Hukum Kab/Kota 2. Bappeda Kab/Kota 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota 4. BPJS Kab/Kota 5. Rumah Sakit Umum 6. Puskesmas 7. Dinas Pendidikan 8. Dinas Sosial
7	Hak atas pendidikan	Dinas Pendidikan Kab/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Hukum Kab/Kota 2. Bappeda Kab/Kota
8	Hak atas pekerjaan	Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Hukum Kab/Kota 2. Bappeda Kab/Kota 3. Badan Kepegawaian Daerah 4. Apindo
9	Hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta hak atas perumahan yang layak	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebutuhan Kab/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Hukum Kab/Kota 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab/Kota 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota 4. PLN 5. Dinas PUPR 6. Dinas Penataan Ruang
10	Hak perempuan dan anak	DP3AKB Kab/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Hukum Kab/Kota 2. Bappeda Kab/Kota 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM

2023



HAK SIPIL DAN POLITIK

- Hak atas Bantuan Hukum
- Hak atas Informasi
- Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan
- Hak atas Keberagaman dan Pluralisme
- Hak atas Kependudukan

HAK EKONOMI, SOSIAL BUDAYA

- Hak atas Kesehatan
- Hak atas Pendidikan
- Hak atas Pekerjaan
- Hak atas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Hak atas Perumahan yang layak
- Hak Perempuan dan Anak



KETENTUAN ISIAN INDIKATOR DAN DADUK



Jateng
gayeng

ALWAYS THE BEST

REFORMASI
HUKUM

icare

PASTI Nyata

ei gov
PASTI Nyata

KETENTUAN ISIAN INDIKATOR DAN DATA DUKUNG KPP HAM

HAK ATAS BANTUAN HUKUM

NO	INDIKATOR	DATA DUKUNG
1	Produk Hukum yang mengatur mengenai ketersediaan bantuan hukum	Perda/perbub/perwali/SE tentang bantuan hukum yang berlaku 10 tahun terakhir khusus Produk Hukum Kabupaten/Kota terkait Bantuan Hukum: <ul style="list-style-type: none"> • Scan pada bagian halaman depan, pasal terkait, halaman pengesahan dilegalisir dan stempel basah • Apabila pada halaman pengesahan diberi tanda tangan elektronik tidak perlu legalisir
2.	Alokasi APBD tentang bantuan hukum	RKPD /Rincian APBD yang memuat program dan anggaran daerah yang menganggarkan kegiatan bantuan hukum tahun 2023: <ul style="list-style-type: none"> • Scan anggaran terkait Bantuan Hukum pada DPA pada bagian alokasi anggaran ditandai dengan stabilo dan diberi legalisir serta stempelbasah • Tanda tangan elektronik tidak perlu legalisir
3.	Tersedianya bantuan hukum litigasi (peradilan)	Data target dan jumlah alokasi anggaran bantuan hukum litigasi tahun 2023, bantuan hukum yang diberikan harus dari pemda/menggunakan APBD Tahun 2023. <ul style="list-style-type: none"> • Data target dan alokasi anggaran ditandai dengan stabilo dan dilegalisir sertastempel basah • Tanda tangan elektronik tidak perlu legalisir
4.	Tersedianya bantuan hukum nonlitigasi	Data target dan jumlah alokasi anggaran bantuan hukum non litigasi tahun 2023, bantuan hukum yang diberikan harus dari pemda/menggunakan APBD Tahun 2023 <ul style="list-style-type: none"> • Data target dan alokasi anggaran ditandai dengan stabilo dan dilegalisir sertastempel basah • Tanda tangan elektronik tidak perlu legalisir • Bantuan Hukum nonlitigasi Permenkumham Pasal 9 ayat (2) berupa: a. penyuluhan hukum; b. konsultasi hukum; c. investigasi kasus, baik secara elektronik maupun nonelektronik;d. penelitian hukum; e. mediasi; f. negosiasi; g. pemberdayaan masyarakat; h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau i. drafting dokumen hukum.
5.	Tersedianya Organisasi bantuan Hukum yang terdaftar	OBH yang terakreditasi pada Kemenkumham melalui SK Menteri Hukum dan HAM: <ul style="list-style-type: none"> • Scan SK akreditasi OBH dari Kemenkumham • Nama OBH pada lampiran SK ditandai dengan stabilo
6.	Persentase masyarakat miskin yang menerima bantuan hukum	Jumlah masyarakat miskin yang menerima bantuan hukum dan jumlah masyarakat miskin yang mengajukan pada Tahun 2023 berkop, ditandatangani, bertanggal dan stempel basah OPD terkait



HAK ATAS INFORMASI

NO	INDIKATOR	DATA DUKUNG
1.	Produk Hukum Daerah yang mengatur mengenai ketersediaan informasi publik	Perda/perbub/perwali/SE tentang Informasi Publik yang berlaku 10 tahun terakhir khusus Produk Hukum Kabupaten/Kota terkait Informasi Publik: <ul style="list-style-type: none"> • Scan pada bagian halaman depan, pasal terkait, halaman pengesahan dilegalisir dan diberi stempel basah • Tanda tangan elektronik tidak perlu legalisir
2.	Tersedianya akses terhadap Informasi Publik yang efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara non digital	Keterbukaan Informasi Publik, non digital dapat berbentuk pengumuman media cetak, spanduk, leaflet dsb.) <ul style="list-style-type: none"> • Berbentuk foto berkop, ditanda tangani, bertanggal dan stempel basah OPD terkait
3.	Tersedianya akses terhadap Informasi Publik yang efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara digital	Keterbukaan Informasi Publik, digital dapat berbentuk pengumuman di media elektronik dan online, diantaranya bisa screenshot dari website <ul style="list-style-type: none"> • Berbentuk foto berkop, ditanda tangani, bertanggal dan stempel basah OPD terkait
4.	Persentase tindak lanjut permohonan data informasi publik	Jumlah permohonan informasi publik digital dan atau non digital yang ditindaklanjuti dan jumlah permohonan informasi publik digital dan atau non digital yang diajukan pada Tahun 2023 berkop, ditandatangani, bertanggal dan stempel basah OPD terkait <ul style="list-style-type: none"> • Data diperoleh dari PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo

HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN

NO	INDIKATOR	DATA DUKUNG
1	Produk hukum daerah yang mengatur mengenai; <p>a. Menjamin ketersediaan ruang partisipasi masyarakat dalam pemerintahan</p>	Produk hukum Kabupaten/Kota yang pasalnya menyatakan adanya penjaminan ketersediaan ruang partisipasi masyarakat dalam pemerintahan yang berlaku 10 Tahun terakhir. <ul style="list-style-type: none"> • Scan halaman depan, pasal terkait, halaman pengesahan dilegalisir dan stempel basah OPD terkait • Tanda tangan elektronik tidak perlu legalisir



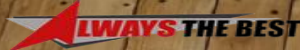
	b. Partisipasi masyarakat yg berasal dari perempuan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia dan/masyarakat adat dalam pengambilan keputusan/kebijakan	Produk hukum Kabupaten/Kota yang pasalnya menyatakan adanya partisipasi masyarakat yang berasal dari perempuan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia dan/masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, yang berlaku 10 Tahun terakhir. <ul style="list-style-type: none"> • Scan halaman depan, pasal terkait, halaman pengesahan dilegalisir dan stempel basah OPD terkait • Tanda tangan elektronik tidak perlu legalisir
2.	Alokasi APBD tentang bantuan keuangan Parpol	Alokasi bantuan keuangan parpol tingkat kab/kota dan Jumlah 1.500 x Jumlah suara sah 1.500 adalah angka minimal, jika di kab/kota jumlahnya perkaliannya diatas 1500 maka harap disesuaikan <ul style="list-style-type: none"> • Scan anggaran terkait bantuan keuangan Parpol ditandai dengan stabilo dilegalisir dan diberi stempel basah OPD terkait • Scan jumlah suara sah ditandai dengan stabile, ditanda tangani dan stempel basah OPD terkait • Tanda tangan elektronik tidak perlu legalisir
3.	Partisipasi masyarakat yang berasal dari perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan/atau masyarakat adat dalam pengambilan keputusan/kebijakan	Notulen/daftar hadir perwakilan perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia dan/atau masyarakat adat dalam hearing, konsultasi publik, musyawarah perencanaan pembangunan sebelum pengambilan keputusan pada Tahun 2023 <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen pelaksanaan kegiatan berkop, ditanda tangani, bertanggal dan stempel basah OPD terkait
4.	Terdapat pelibatan masyarakat yang berasal dari perempuan anak, penyandang disabilitas, lansia, dan/atau masyarakat adat dalam penyusunan peraturan hukum daerah	Notulen/ daftar hadir perwakilan perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia dan/atau masyarakat adat dalam hearing/konsultasi publik pada saat penyusunan produk hukum daerah (masukan dapat berupa surat yang disampaikan dalam bentuk digital maupun non digital) pada Tahun 2023 <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen pelaksanaan kegiatan berkop, ditanda tangani, bertanggal dan stempel basah OPD terkait
5.	Proporsi jumlah perempuan yang dicalonkan di dalam pemilihan anggota DPRD Kab/Kota oleh Parpol	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perempuan bakal calon anggota DPRD dan Jumlah bakal calon anggota DPRD (Pilkada terakhir, Data Pemilu terakhir) • Data berbentuk tabel berkop, ditanda tangani, bertanggal dan stempel basah OPD terkait

HAK ATAS KEBERAGAMAN DAN PLURALISME

NO	INDIKATOR	DATA DUKUNG
1.	Produk hukum daerah yang mengatur mengenai keberagaman dan pluralisme	Perda kab/kota terkait keberagaman dan pluralisme yang berlaku 10 Tahun terakhir, tidak harus perda tersendiri tetapi dapat dijadikan acuan jika terdapat dalam peraturan lain <ul style="list-style-type: none"> • Scan halaman depan, pasal terkait dan halaman pengesahan legalisir stempel basah OPD terkait • Tanda tangan elektronik tidak perlu legalisir



2.	Perencanaan dan penganggaran daerah yang memuat pengarusutamaan HAM	Kegiatan/program dalam RKPD daerah (dalam bentuk perda)/APBD terkait pengarusutamaan HAM pada Tahun 2023 <ul style="list-style-type: none"> • Scan anggaran terkait dan alokasi anggaran ditandai dengan stabilo, dilegalisir dan stempel basah OPD terkait • Tanda tangan elektronik tidak perlu legalisir
3.	Alokasi APBD tentang program dan atau kegiatan FKUB	Scan APBD yang ada rincian program terkait kegiatan FKUB Tahun 2023 <ul style="list-style-type: none"> • Scan anggaran terkait dan alokasi anggaran ditandai dengan stabilo legalisir dan diberi stempel basah • Tanda tangan elektronik tidak perlu legalisir
4.	Tersedianya Tim terpadu penanganan konflik sosial	Scan SK Tim terpadu penanganan konflik sosial Tahun 2023
5.	Adanya kasus pelayanan publik diskriminatif yang dilaporkan	Data pengaduan pelayanan publik dari Ombudsman Daerah/Inspektorat Daerah Tahun 2023 <ul style="list-style-type: none"> • Jika ada kasus pelayanan publik diskriminatif yang dilaporkan, data dukung berupa surat keterangan dari Ombudsman Perwakilan/Inspektorat daerah bahwa ada kasus pelayanan publik diskriminatif yang dilaporkan. • Jika tidak ada kasus pelayanan publik diskriminatif yang dilaporkan, data dukung berupa surat keterangan Ombudsman Perwakilan/inspektorat daerah yang menerangkan bahwa tidak ada kasus pelayanan publik yang dilaporkan • Data berbentuk Surat Keterangan berkop, ditanda tangani, bertanggal dan stempel basah OPD terkait
6.	Tersedianya analisis produk hukum daerah terhadap nilai-nilai Pancasila	Hasil kajian/analisis produk hukum daerah yang berisi nilai-nilai Pancasila pada Tahun 2023 <ul style="list-style-type: none"> • Scan halaman pertama, isi terkait dan halaman pengesahan • Berkop, bertanggal, ditanda tangani dan stempel basah OPD terkait
7.	Program dan atau kegiatan di lingkungan institusi pemerintah daerah mengenai keberagaman dan pluralisme	Laporan program/kegiatan terkait keberagaman dan pluralisme di Tahun 2023 berkop, ditanda tangani, bertanggal dan stempel basah OPD terkait
8.	Proporsi institusi daerah yang mendapatkan pemahaman mengenai keberagaman dan pluralisme	Laporan sosialisasi keberagaman dan pluralisme di OPD dan instansi daerah terkait pada Tahun 2023. <ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan berkop, ditanda tangani, bertanggal dan stempel basah OPD terkait dengan lampiran data Jumlah institusi daerah yang mendapatkan pemahaman keberagaman dan pluralisme dan Jumlah institusi daerah di kabupaten/kota, undangan, daftar hadir dan foto kegiatan.
9.	Terlaksananya kegiatan FKUB	Laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh FKUB di Tahun 2023 <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kegiatan berkop, tanda tangan, tanggal dan stempel basah OPD terkait dengan lampiran undangan, daftar hadir dan foto kegiatan.



10.	Jumlah kasus pelayanan publik diskriminatif yang ditindaklanjuti	<p>Rekomendasi ombudsman daerah yang ditindaklanjuti pada Tahun 2023.</p> <p>Indikator No.10 Jumlah kasus pelayanan publik diskriminatif yang ditindaklanjuti harus selaras dengan indikator No.5. Jika pada indikator No 5 tidak ada, maka pada indikator No 10 diisi 0 (nol).</p> <p>Jika ada kasus pelayanan publik diskriminatif yang dilaporkan, maka diisi jumlah kasus pelayanan publik diskriminatif yang dilaporkan dan yang ditindaklanjuti (indikator no.5 pilih ada).</p> <ul style="list-style-type: none"> Data Dukung berupa tabel berkop, tanda tangan, tanggal dan stempel basah OPD terkait
-----	--	---

HAK ATAS KEPENDUDUKAN

NO	INDIKATOR	DATA DUKUNG
1.	Produk Hukum daerah yang mengatur mengenai kependudukan catatan sipil	<p>Produk hukum kabupaten/Kota yang mengatur mengenai kependudukan dan catatan sipil yang berlaku 10 Tahun terakhir.</p> <ul style="list-style-type: none"> Scan halaman depan, pasal terkait dan halaman pengesahan dilegalisir dan stempel basah OPD terkait Tanda tangan elektronik tidak perlu legalisir
2.	Tersedianya SOP dan fasilitas layanan masyarakat terkait masalah kependudukan dan pencatatan sipil	Scan SOP dan fasilitas layanan masyarakat terkait masalah kependudukan dan pencatatan sipil
3.	Tersedianya mekanisme pendataan dan penerbitan dokumen pendudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan	Scan SOP atau dokumen yang memuat mekanisme pendataan dan penerbitan dokumen pendudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan (misalnya penyandang disabilitas, anak, lansia dll)
4.	Tersedianya sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) dengan data yang termutakhirkan	Data dukung dapat berupa screenshot sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) dengan data yang termutakhirkan berkop, tanda tangan, tanggal dan stempel basah OPD terkait
5.	Cakupan perekaman KTP Elektronik	Data dukung berupa tabel jumlah penduduk ≥ 17 tahun dan atau < 17 tahun yang sudah atau pernah menikah yang telah melakukan perekaman KTP-el dan Jumlah penduduk wajib KTP-el di Tahun 2023 berkop, tanda tangan, tanggal dan stempel basah OPD terkait
6.	Cakupan kepemilikan KIA	Data dukung berupa tabel jumlah penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki KIA dan Jumlah penduduk usia 0- 17 tahun di Tahun 2023 berkop, tanda tangan, tanggal dan stempel basah OPD terkait



Jateng
gayeng

ALWAYS THE BEST

REFORMASI
HUKUM



PASTI Nyata



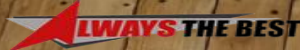
7.	Cakupan kepemilikan KTP Elektronik	Data dukung berupa tabel yang memuat jumlah penduduk ≥ 17 tahun dan/atau < 17 tahun yang sudah atau pernah menikah yang memiliki e-ktip dan jumlah penduduk wajib e-KTP di Tahun 2023 berkop, tanda tangan, tanggal dan stempel basah OPD terkait
8.	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Data dukung berupa tabel yang memuat Jumlah penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran dan Jumlah penduduk usia 0-17 tahun di Tahun 2023 berkop, tanda tangan, tanggal dan stempel basah OPD terkait
9.	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua penduduk yang perkawinannya dilaporkan	Data dukung berupa tabel yang memuat jumlah penduduk yang memiliki buku nikah atau akta perkawinan dan jumlah penduduk yang melaporkan perkawinannya di Tahun 2023 berkop, tanda tangan, tanggal dan stempel basah OPD terkait
10.	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian semua individu yang perceraian dilaporkan	Data Dukung berupa tabel yang memuat jumlah penduduk yang memiliki akta perceraian dan jumlah penduduk yang melaporkan perceraian di Tahun 2023 berkop, tanda tangan, tanggal dan stempel basah OPD terkait
11.	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Data dukung berupa tabel jumlah penduduk yang memiliki akta kematian dan jumlah penduduk meninggal yang dilaporkan berkop, tanda tangan, tanggal dan stempel basah OPD terkait

HAK ATAS KESEHATAN

NO	INDIKATOR	DATA DUKUNG
1.	Produk Hukum Daerah yang mengatur mengenai: Penyelenggaraan Layanan Kesehatan	Produk Hukum/Kebijakan Daerah Kab/Kota terkait penyelenggaraan layanan kesehatan yang berlaku 5 tahun terakhir <ul style="list-style-type: none"> • Scan halaman depan, pasal terkait dan halaman pengesahan dilegalisir dan stempel basah OPD terkait • Tanda tangan elektronik tidak perlu legalisir
2.	Persentase alokasi anggaran kesehatan dari APBD	Jumlah alokasi anggaran kesehatan 2023 dan jumlah keseluruhan APBD Tahun 2023 <ul style="list-style-type: none"> • Discan ditandai stabilo dan dilegalisir dan stempel basah OPD terkait • Tanda tangan elektronik tidak perlu legalisir
3.	Rasio tenaga dokter per penduduk	Jumlah tenaga dokter dan jumlah penduduk di wilayah kab/kota berkop, tanggal, tandatangan dan Stempel basah OPD terkait <ul style="list-style-type: none"> • Data terkait kesehatan disahkan oleh kepala OPD dinas Kesehatan • Data terkait kependudukan oleh Kepala Dinas Dukcapil



		<ul style="list-style-type: none"> • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo
4.	Rasio tenaga dokter gigi per penduduk	<p>Jumlah tenaga dokter gigi dan jumlah penduduk di wilayah kab/kota berkop, tanggal, tandatangan dan stempel basah OPD terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data terkait kesehatan disahkan oleh kepala OPD dinas Kesehatan • Data terkait kependudukan oleh Kepala Dinas Dukcapil • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo
5.	Rasio tenaga dokter spesialis per penduduk	<p>Jumlah tenaga dokter spesialis dan jumlah penduduk di wilayah kab/kota berkop, tanggal, tandatangan dan Stempel basah OPD terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data terkait kesehatan disahkan oleh kepala OPD dinas Kesehatan • Data terkait kependudukan oleh Kepala Dinas Dukcapil • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo
6.	Rasio tenaga bidan per penduduk	<p>Jumlah tenaga bidan dan jumlah penduduk di wilayah kab/kota berkop, tanggal, tandatangan dan Stempel basah OPD terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data terkait kesehatan disahkan oleh kepala OPD dinas Kesehatan • Data terkait kependudukan oleh Kepala Dinas Dukcapil • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo
7.	Rasio tenaga perawat per penduduk	<p>Jumlah tenaga perawat dan jumlah penduduk di wilayah kab/kota berkop, tanggal, tandatangan dan Stempel basah OPD terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data terkait kesehatan disahkan oleh kepala OPD dinas Kesehatan • Data terkait kependudukan oleh Kepala Dinas Dukcapil • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo
8.	Rasio puskesmas terhadap kecamatan	<p>Jumlah puskesmas dan jumlah seluruh kecamatan di wilayah kab/kota berkop, tanggal, tandatangan dan Stempel basah OPD terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data terkait kesehatan disahkan oleh kepala OPD dinas Kesehatan • Data terkait kependudukan oleh Kepala Dinas Dukcapil • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo
9.	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	<p>Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan jumlah seluruh puskesmas di wilayah kab/kota berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo
10.	Tersedianya RSUD Kabupaten/Kota	<p>Data RSUD yang terakreditasi nasional sesuai peraturan dan standar Kemenkes RI berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nama RSUD yang terakreditasi nasional ditandai dengan stabilo



11.	Rasio ketersediaan tempat tidur rumah sakit per satuan penduduk.	Jumlah tempat tidur RS dan jumlah penduduk di Wilayah Kab/Kota berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait <ul style="list-style-type: none"> • Data terkait Kesehatan disahkan oleh kepala OPD dinas Kesehatan • Data terkait kependudukan oleh Kepala Dinas Dukcapil • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo
12.	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/BPJS Kesehatan	Jumlah kepesertaan JKN/BPJS Kesehatan dan jumlah penduduk di Wilayah Kab/Kota berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait <ul style="list-style-type: none"> • Data terkait BPJS disahkan oleh kepala BPJS • Data terkait kependudukan oleh Kepala Dinas Dukcapil • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo
13.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil difasilitas pemerintah dan swasta dan jumlah semua ibu hamil di wilayah kab/kota berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait <ul style="list-style-type: none"> • Data terkait Kesehatan disahkan oleh kepala OPD Dinkes • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo
14.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinan sesuai standar dan jumlah semua ibu bersalin di wilayah kab/kota berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait <ul style="list-style-type: none"> • Data terkait Kesehatan disahkan oleh kepala OPD Dinkes • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo
15.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir sesuai standar dan Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah kab/kota berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait <ul style="list-style-type: none"> • Data terkait Kesehatan disahkan oleh kepala OPD Dinkes • Data terkait kependudukan disahkan oleh Kepala Dinas Dukcapil • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo
16.	Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) pada anak 12-23 bulan	Jumlah anak usia 12-23 bulan mendapat IDL dan jumlah anak usia 12- 23 bulan di wilayah kab/kota di Tahun 2023 berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait <ul style="list-style-type: none"> • Data terkait Kesehatan disahkan oleh kepala OPD Dinkes • Data terkait kependudukan disahkan oleh Kepala Dinas Dukcapil • Angka Jumlah anak usia 12-23 bulan mendapat IDL dan jumlah anak usia 12- 23 bulan di wilayah kab/kota di Tahun 2023 ditandai dengan stabile

17.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai Standar	Jumlah balita usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar tahun 2023 dan jumlah balita usia 0-59 bulan yang ada di wilayah Kab/Kota tahun 2023 berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait <ul style="list-style-type: none"> • Data terkait Kesehatan disahkan oleh kepala OPD Dinkes • Data terkait kependudukan oleh Kepala Dinas Dukcapil • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo
18.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar dan Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah kab/kota berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait <ul style="list-style-type: none"> • Data terkait Kesehatan disahkan oleh kepala OPD Dinkes • Data terkait kependudukan disahkan oleh Kepala Dinas Dukcapil • Data terkait pendidikan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo
19.	Program skrining kesehatan sesuai standar bagi WNI usia 15- 59 tahun	Laporan program skrining kesehatan sesuai standar bagi WNI usia 15- 59 tahun di Tahun 2023 disertai foto berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait
20.	Program skrining kesehatan sesuai standar bagi WNI usia 60 tahun keatas	Laporan Program skrining kesehatan sesuai standar bagi WNI usia 60 tahun keatas di Tahun 2023 disertai foto, berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait
21.	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapat pelayanan Kesehatan sesuai standar	Jumlah peserta hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar tahun 2023 dan jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kab/kota berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait <ul style="list-style-type: none"> • Data terkait Kesehatan disahkan oleh kepala OPD Dinkes • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo
22.	Program terhadap penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Laporan Program/kegiatan kepada penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar disertai foto, berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait
23.	Persentase ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yg mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar di tahun 2023 dan jumlah ODGJ berat (psikotik) yg ada di wilayah kerja kab/kota di Tahun 2023 berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait <ul style="list-style-type: none"> • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo
24.	Persentase orang dengan TB yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Jumlah orang yang mendapat pelayanan TB sesuai standar di tahun 2023 dan jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah Kab/Kota tahun 2023 berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait <ul style="list-style-type: none"> • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo



25.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan pemeriksaan/ deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan tahun 2023 dan jumlah orang yang beresiko terinfeksi HIV yang ada di wilayah kab/kota tahun 2023 berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait <ul style="list-style-type: none"> • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo
26.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Jumlah angka kematian bayi Tahun 2023 dan jumlah angka kelahiran hidup Tahun 2023 berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait <ul style="list-style-type: none"> • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo
27.	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	Jumlah wanita yang meninggal akibat kehamilan persalinan dan nifas di wilayah kab/kota tahun 2023 dan jumlah kelahiran hidup pada populasi di kab/kota tahun 2023 berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait <ul style="list-style-type: none"> • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo
28.	Prevalensi balita (anak usia dibawah 2 tahun) stunting/kerdil)	Jumlah balita stunting yang ada di kab/kota tahun 2023 dan jumlah balita yang ada di kab/kota di Tahun 2023 berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait <ul style="list-style-type: none"> • Data terkait kesehatan disahkan oleh kepala Dinas Kesehatan • Data terkait kependudukan disahkan oleh Kepala Dinas Dukcapil • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo
29.	Prevalensi balita gizi buruk	Jumlah balita gizi buruk yang ada di kab/kota di tahun 2023 dan jumlah balita yang ada di kab/kota di tahun 2023 berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait <ul style="list-style-type: none"> • Data terkait kesehatan disahkan oleh kepala Dinas Kesehatan • Data terkait kependudukan disahkan oleh Kepala Dinas Dukcapil • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo
30.	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	Jumlah balita wasting yang ada di kab/kota tahun 2023 dan jumlah balita yang ada di kab/kota tahun 2023 berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait <ul style="list-style-type: none"> • Data terkait kesehatan disahkan oleh kepala Dinas Kesehatan • Data terkait kependudukan disahkan oleh Kepala Dinas Dukcapil • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo



HAK ATAS PENDIDIKAN

NO	INDIKATOR	DATA DUKUNG
1.	Produk hukum daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan layanan pendidikan	Produk Hukum/Kebijakan Daerah Kab/Kota terkait penyelenggaraan layanan Pendidikan berlaku 10 tahun terakhir <ul style="list-style-type: none"> • scan halaman depan, pasal terkait dan halaman pengesahan dilegalisir dan stempel basah OPD terkait • Tanda tangan elektronik tidak perlu legalisir
2.	Persentase alokasi anggaran pendidikan dari APBD	Jumlah alokasi anggaran pendidikan dari total APBD tahun 2023 dan jumlah total APBD tahun 2023 dilegalisir dan stempel basah OPD terkait <ul style="list-style-type: none"> • Tanda tangan elektronik tidak perlu legalisir • Angka pada data dukung ditandai stabilo
3.	Persentase Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di tingkat kecamatan	Jumlah PKBM tahun 2023 dan jumlah kecamatan berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait <ul style="list-style-type: none"> • Data terkait pendidikan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan • Data terkait kependudukan disahkan oleh Kepala Dinas Dukcapil • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo
4.	Persentase PAUD di tingkat Desa atau Kelurahan	Jumlah PAUD tahun 2023 dan jumlah desa/kelurahan berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait <ul style="list-style-type: none"> • Data terkait Pendidikan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan • Data terkait kependudukan disahkan oleh Kepala Dinas Dukcapil • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo
5.	Persentase SD terakreditasi B	Jumlah SD berakreditasi B tahun 2023 dan jumlah seluruh SD (selain sekolah keagamaan) tahun 2023 berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait <ul style="list-style-type: none"> • Kata terakreditasi B disini dimaksudkan adalah minimal akreditasi B, jadi sekolah akreditasi A juga harus dihitung. (Sekolah akreditasi A dan sekolah Akreditasi B) • Data terkait pendidikan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo
6	Persentase sekolah keagamaan setingkat SD terakreditasi B	Jumlah sekolah keagamaan setingkat SD terakreditasi B tahun 2023 dan jumlah seluruh sekolah keagamaan setingkat SD tahun 2023 berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait <ul style="list-style-type: none"> • Kata terakreditasi B disini dimaksudkan adalah minimal akreditasi B, jadi sekolah akreditasi A juga harus dihitung. (Sekolah akreditasi A dan sekolah Akreditasi B) • Data disahkan oleh Kemenag • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo



7.	Persentase SMP terakreditasi B	Jumlah SMP terakreditasi B tahun 2023 dan jumlah seluruh SMP (selain sekolah keagamaan) tahun 2023 berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait <ul style="list-style-type: none"> • Kata terakreditasi B disini dimaksudkan adalah minimal akreditasi B, jadi sekolah akreditasi A juga harus dihitung. (Sekolah akreditasi A dan sekolah Akreditasi B) • Data disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo
8.	Persentase sekolah keagamaan setingkat SMP terakreditasi B	Jumlah sekolah keagamaan setingkat SMP terakreditasi B tahun 2023 dan jumlah seluruh sekolah keagamaan setingkat SMP tahun 2023 berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait <ul style="list-style-type: none"> • Kata terakreditasi B disini dimaksudkan adalah minimal akreditasi B, jadi sekolah akreditasi A juga harus dihitung. (Sekolah akreditasi A dan sekolah Akreditasi B) • Data disahkan oleh Kemenag • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo
9.	Rasio ketersediaan guru PAUD berbanding peserta didik	Jumlah murid PAUD di kab/kota tahun 2023 dan jumlah guru PAUD di kab/kota tahun 2023 berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait <ul style="list-style-type: none"> • Data disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo
10.	Rasio ketersediaan guru SD berbanding peserta didik SD	Jumlah murid SD di kab/kota tahun 2023 dan jumlah guru SD di kab/kota tahun 2023 berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait <ul style="list-style-type: none"> • Data disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo
11.	Rasio ketersediaan guru SMP berbanding peserta didik SMP	Jumlah murid SMP di kab/kota tahun 2023 dan jumlah guru SMP di kab/kota tahun 2023 berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait <ul style="list-style-type: none"> • Data disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo
12.	Persentase guru PAUD, SD dan SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D4	Jumlah guru PAUD, SD dan SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D4 di kab/kota tahun 2023 dan jumlah guru PAUD, SD, SMP di kab/kota tahun 2023 berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait <ul style="list-style-type: none"> • Data disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo
14.	Tersedianya layanan disabilitas di SD dan SMP	Data Dukung berupa laporan layanan disabilitas di sekolah seperti penyediaan guru khusus untuk murid tuna rungu, dll, berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait
15.	Program pencegahan perundungan terhadap siswa SD dan SMP	Laporan Program pencegahan perundungan terhadap siswa SD dan SMP berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait



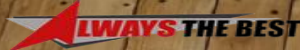
16.	Angka putus sekolah SD	Jumlah angka putus sekolah SD di kab/kota tahun 2023 dan jumlah murid sekolah SD di kab/kota tahun 2023 berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait <ul style="list-style-type: none"> • Data disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo
17	Angka putus sekolah SMP	Jumlah angka putus sekolah SMP di kab/kota tahun 2023 dan jumlah murid sekolah SMP di kab/kota tahun 2023 berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait <ul style="list-style-type: none"> • Data disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo
18.	Angka melanjutkan SD/ sederajat ke SMP/ sederajat	Jumlah siswa SD /sederajat yang melanjutkan ke SMP/ sederajat di kab/kota tahun 2023 dan jumlah siswa SD/ sederajat di kab/kota tahun 2023 berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait <ul style="list-style-type: none"> • Siswa SD Sederajat diartikan hanya siswa sd kelas 6 saja. bukan jumlah keseluruhan siswa kelas 1- 6. • Data disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo
19.	Angka partisipasi murni SD	Jumlah siswa SD/ sederajat usia 7-12 tahun di kab/kota tahun 2023 dan jumlah penduduk usia 7-12 tahun di kab/kota tahun 2023 berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait <ul style="list-style-type: none"> • Data terkait pendidikan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan • Data terkait kependudukan disahkan oleh Kepala Dinas Dukcapil • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo
20.	Angka partisipasi murni SMP	Jumlah siswa SMP/ sederajat usia 13-15 tahun di kab/kota tahun 2023 dan jumlah penduduk usia 13-15 tahun di kab/kota tahun 2023 berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait <ul style="list-style-type: none"> • Data terkait pendidikan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan • Data terkait kependudukan disahkan oleh Kepala Dinas Dukcapil • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo

HAK ATAS PEKERJAAN

NO	INDIKATOR	DATA DUKUNG
1.	Produk Hukum daerah yang mengatur mengenai Ketenagakerjaan	Produk Hukum/Kebijakan Daerah terkait ketenagakerjaan yang berlaku 10 tahun terakhir <ul style="list-style-type: none"> • Scan halaman depan, pasal terkait dan halaman pengesahan dilegalisir dan diberi stempel basah OPD terkait • Tanda tangan elektronik tidak perlu legalisir



2.	Alokasi anggaran ketenagakerjaan dari APBD	Scan APBD 2023 yang ada penganggaran terkait ketenagakerjaan dan alokasi Anggaran terkait diberi tanda stabilo dilegalisir dan diberi stempel basah OPD terkait <ul style="list-style-type: none"> • Tanda tangan elektronik tidak perlu legalisir
3.	Besaran tenaga kerja yang mengikuti pelatihan kerja berbasis kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan kerja berbasis kompetensi di tahun 2023 dan jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi di tahun 2023 berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait <ul style="list-style-type: none"> • Data disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo
4.	Besaran tenaga kerja yang mengikuti pelatihan kerja berbasis kewirausahaan	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan kerja berbasis kewirausahaan di tahun 2023 dan jumlah pendaftar pelatihan berbasis kewirausahaan tahun 2023 berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait <ul style="list-style-type: none"> • Data disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo
5	Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Jumlah pencari kerja ditempatkan tahun 2023 dan jumlah pencari kerja terdaftar tahun 2023 berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait <ul style="list-style-type: none"> • Data disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo
6.	Besaran pekerja dalam hubungan kerja yang menjadi program JAMSOSTEK aktif	Jumlah pekerja/buruh dalam hubungan kerja yang menjadi peserta jamsostek aktif di tahun 2023 dan jumlah pekerja/buruh dalam hubungan kerja tahun 2023 berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait <ul style="list-style-type: none"> • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo
7.	Pekerja/Buruh yang menjadi anggota serikat pekerja di dalam hubungan kerja	Jumlah Pekerja/Buruh yang menjadi anggota serikat pekerja di wil kab/kota pada 2023 dan jumlah pekerja/buruh di dalam hubungan kerja di wilayah kab/kota pada 2023 berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait <ul style="list-style-type: none"> • Data disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo
8.	Besaran kasus yang terselesaikan dengan perjanjian bersama	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan dengan perjanjian bersama di tahun 2023 dan jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan ke Dinas ketenagakerjaan di tahun 2023 berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait <ul style="list-style-type: none"> • Data disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja • Angka pada data dukung ditandai dengan stabile



9.	Tingkat pengangguran terbuka	Jumlah penduduk yang termasuk dalam kategori pengangguran di wilayah kab/kota tahun 2023 dan jumlah angkatan kerja di wil kab/kota tahun 2023 berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait <ul style="list-style-type: none"> • Data disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo
10	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	Jumlah angkatan kerja di wilayah kab/kota tahun 2023 dan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas di wilayah kab/kota tahun 2023 berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait <ul style="list-style-type: none"> • Data terkait ketenagakerjaan disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja • Data terkait kependudukan disahkan oleh Kepala Dinas Dukcapil • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo
11.	Persentase pegawai penyandang disabilitas di instansi pemerintah	Jumlah pegawai penyandang disabilitas di instansi pemerintah di wil kab/kota tahun 2023 dan jumlah pegawai di instansi pemerintah kab/kota tahun 2023 berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pegawai ini bukan Hanya ASN, tetapi juga dihitung jumlah pegawai dan Jumlah pegawai disabilitas system kontrak (asal gaji dibayar dengan APBD) • Data dukung berupa table (kop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah)

HAK ATAS LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT SERTA HAK ATAS PERUMAHAN YANG LAYAK

NO	INDIKATOR	DATA DUKUNG
1	Produk Hukum Daerah yang mengatur mengenai:	
	a. Rencana Tata Ruang	Produk hukum yang mengatur mengenai Rencana Tata Ruang yang berlaku 10 Tahun terakhir <ul style="list-style-type: none"> • Scan halaman depan, pasal terkait dan halaman pengesahan dilegalisir dan stempel basah OPD terkait • Tanda tangan elektronik tidak perlu legalisir
	b. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Produk hukum yang mengatur mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berlaku 10 Tahun terakhir <ul style="list-style-type: none"> • Scan halaman depan, pasal terkait dan halaman pengesahan dilegalisir dan stempel basah OPD terkait • Tanda tangan elektronik tidak perlu legalisir

	c. Rumah Layak Huni	<p>Produk hukum yang mengatur mengenai Rumah Layak Huni yang berlaku 10 Tahun terakhir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scan halaman depan, pasal terkait dan halaman pengesahan dilegalisir dan stempel basah OPD terkait • Tanda tangan elektronik tidak perlu legalisir
	d. Pengelolaan Sampah dan Limbah	<p>Produk hukum yang mengatur mengenai Pengelolaan Sampah dan Limbah yang berlaku 10 Tahun Terakhir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scan halaman depan, pasal terkait dan halaman pengesahan dilegalisir dan stempel basah OPD terkait • Tanda tangan elektronik tidak perlu legalisir
	e. Produk hukum daerah lainnya terkait lingkungan	<p>Produk hukum daerah lainnya terkait lingkungan yang berlaku 10 Tahun Terakhir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scan halaman depan, pasal terkait dan halaman pengesahan dilegalisir dan stempel basah OPD terkait • Tanda tangan elektronik tidak perlu legalisir
2.	Persentase tersedianya fasilitas ruang bermain, sarana olahraga (SOR), dan taman sebesar 10 % dari Ruang Terbuka Hijau Publik.	<p>Jumlah luas ruang bermain, SOR dan taman di wil kab/kota di tahun 2023 dan total RTH publik di wilayah kab/kota di tahun 2023 berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo
3.	Persentase ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% dari luas kawasan perkotaan	<p>Jumlah luas RTH di wil kab/kota tahun 2023 dan total luas kawasan perkotaan di wilayah kab/kota tahun 2023 berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo
4.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	<p>Jumlah rumah tangga dengan akses air minum layak dan jumlah rumah tangga berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo • Data jumlah rumah tangga indikator 4, 5 dan 6 harus sama.
5.	Persentase rumah tangga bersanitasi yang layak	<p>Jumlah rumah tangga bersanitasi yang layak di wilayah kab/kota tahun 2023 dan jumlah keseluruhan rumah tangga di wil kab/kota tahun 2023 berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo • Data jumlah rumah tangga indikator 4, 5 dan 6 harus sama.
6.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	<p>Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik di wil kab/kota tahun 2023 dan jumlah keseluruhan rumah tangga di wilayah kab/kota tahun 2023 berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo • Data jumlah rumah tangga indikator 4, 5 dan 6 harus sama

7.	Persentase penanganan sampah	Volume sampah yang tertangani (satuan m3) di wilayah kab/kota tahun 2023 dan jumlah keseluruhan produksi sampah (satuan m3) di wilayah kab/kota tahun 2023 berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait <ul style="list-style-type: none"> • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo
8.	Program penyediaan rumah layak huni dan terjangkau (Data dukung : Laporan program/Kegiatan)	Laporan kegiatan program penyediaan rumah layak huni dan terjangkau tahun 2023 disertai data dan foto kegiatan berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait
9.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Jumlah rumah tangga yang menempati hunian yang layak dan terjangkau di wil.kab/kota tahun 2023 dan jumlah rumah tangga wilayah kab/kota tahun 2023 berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait <ul style="list-style-type: none"> • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo
10.	Presentase permukiman layak huni (Data dukung : total luas wilayah permukiman layak huni dan total luas wilayah permukiman).	Total luas wilayah permukiman layak huni di wil kab/kota tahun 2023 dan total luas wilayah permukiman di wilayah kab/kota tahun 2023 berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait <ul style="list-style-type: none"> • Angka pada data dukung ditandai dengan stabilo

HAK PEREMPUAN DAN ANAK

NO	INDIKATOR	DATA DUKUNG
1.	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, seperti:	
	a. Pemberdayaan perempuan wirausaha perempuan	Produk hukum yang mengatur mengenai Pemberdayaan perempuan wirausaha perempuan yang berlaku 10 Tahun terakhir. <ul style="list-style-type: none"> • Scan halaman depan, pasal terkait dan halaman pengesahan dilegalisir dan stempel basah OPD terkait • Tanda tangan elektronik tidak perlu legalisir
	b. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Produk hukum yang mengatur mengenai Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang berlaku 10 Tahun terakhir. <ul style="list-style-type: none"> • Scan halaman depan, pasal terkait dan halaman pengesahan dilegalisir dan stempel basah OPD terkait • Tanda tangan elektronik tidak perlu legalisir

	c. Pemberantasan TPPO Perempuan	<p>Produk hukum yang mengatur mengenai Pemberantasan TPPO yang berlaku 10 Tahun terakhir.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scan halaman depan, pasal terkait dan halaman pengesahan dilegalisir dan stempel basah OPD terkait • Tanda tangan elektronik tidak perlu legalisir
	d. Produk hukum daerah lainnya terkait perempuan :	<p>Produk hukum Lainnya yang mengatur mengenai perempuan yang berlaku 10 Tahun terakhir.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scan halaman depan, pasal terkait dan halaman pengesahan dilegalisir dan stempel basah OPD terkait • Tanda tangan elektronik tidak perlu legalisir
2	Produk hukum daerah yang mengatur mengenai :	<p>scan halaman depan, pasal terkait dan halaman pengesahan dilegalisir dan stempel basah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanda tangan elektronik tidak perlu legalisir
	a. Pelindungan khusus terhadap anak (pencegahan perkawinan anak, pencegahan kekerasan anak, anak korban perdagangan orang, pencegahan pekerja anak, dll)	<p>Produk hukum yang terkait perlindungan anak yang berlaku 10 Tahun terakhir.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scan halaman depan, pasal terkait dan halaman pengesahan dilegalisir dan stempel basah OPD terkait • Tanda tangan elektronik tidak perlu legalisir
	b. Pemenuhan hak anak (kesehatan, pendidikan, sipil, pengasuhan, partisipasi, dll)	<p>Produk hukum yang terkait pemenuhan anak yang berlaku 10 Tahun terakhir.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scan halaman depan, pasal terkait dan halaman pengesahan dilegalisir dan stempel basah OPD terkait • Tanda tangan elektronik tidak perlu legalisir
	c. Produk hukum daerah lainnya terkait anak	<p>Scan produk hukum Lainnya yang mengatur mengenai Anak yang berlaku 10 Tahun terakhir.</p>
3	Alokasi APBD untuk	<p>*APBD terkait program dan kegiatan tentang perempuan dan anak, apabila anggaran khusus tidak ada maka dapat mengambil anggaran berbasis gender.</p>
	a. Perempuan	<p>APBD/ dokumen yang memuat alokasi anggaran untuk Perempuan di tahun 2023 dilegalisir dan stempel basah OPD terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanda tangan elektronik tidak perlu legalisir • Angka pada data dukung ditandai stabilo
	b. Anak	<p>APBD/ dokumen yang memuat alokasi anggaran untuk Anak di tahun 2023 dilegalisir dan stempel basah OPD terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanda tangan elektronik tidak perlu legalisir • Angka pada data dukung ditandai stabile

4.	<p>Tersedianya UPT PPA yang meliputi pelayanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan pengaduan b. Konsultasi c. Mediasi d. Penjangkauan e. Kesehatan f. Rehabilitasi sosial g. Bimbingan rohani h. Pendampingan i. Penegakan dan bantuan hukum j. Layanan pemulangan k. Reintegrasi sosial 	SK UPT PPA yang menampilkan jenis layanan dimaksud.
5.	<p>Tersedianya petugas layanan komponen bagi pelayanan perempuan dan anak di UPT PPA yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tenaga konsultasi b. Kesehatan c. Rehabilitasi sosial d. Bimbingan rohani e. Bantuan dan penegakan hukum f. Penjangkauan dan layanan pemulangan g. Reintegrasi sosial 	SK Petugas pelayanan perempuan anak di UPT PPA yang menampilkan jenis layanan dimaksud.
6.	Tersedianya program pencegahan pekerja anak	Laporan program pencegahan pekerja anak di tahun 2023 berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait
7.	Tersedianya program pencegahan perkawinan anak	Data dukung berupa laporan program pencegahan perkawinan anak di tahun 2023 berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait
8.	Tersedianya panti rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak	Rekapitulasi panti rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak, data dapat berupa gabungan dari kedua panti rehabilitasi atau terpisah berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait
9.	Cakupan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	<p>Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh UPT PPA dan pengaduan /laporan yang masuk di UPT PPA berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angka pada data dukung ditandai stabilo

	pengaduan oleh petugas terlatih di UPT PPA	
10.	Cakupan ketersediaan petugas di UPT PPA yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan dari laporan masyarakat	Jumlah petugas yang memiliki kemampuan penanganan pengaduan di UPT PPA dan jumlah petugas penerima pengaduan yang ada di UPT PPA PPA berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait <ul style="list-style-type: none"> • Angka pada data dukung ditandai stabilo
11.	Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih di UPT PPA	Jumlah petugas terlatih dalam rehabilitasi sosial di UPT PPA dan jumlah petugas rehabilitasi sosial yang ada di UPT PPA berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait <ul style="list-style-type: none"> • Angka pada data dukung ditandai stabilo
12.	Jumlah kasus pekerja anak yang dilaporkan	Jumlah/rekapitulasi kasus pekerja anak yang dilaporkan di tahun 2023 berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait
13.	Jumlah kasus perkawinan anak yang dilaporkan	Rekapitulasi data kasus perkawinan anak yang dilaporkan di tahun 2023 berkop, tanggal, tanda tangan dan stempel basah OPD terkait

KETENTUAN:

1. File scan formulir kuisisioner/data penilaian digabung dengan file data dukung indikator nomor 1 (satu) pada masing-masing hak;
2. File scan Formulir Kuisisioner /data Penilaian dan data dukung dalam format pdf;
3. Batas ukuran maksimum file data dukung per indikator yang dapat diunggah pada aplikasi KKP HAM sebesar 50 megabyte;
4. File data dukung indikator yang bersub misal indikator 1. a, b, c dan seterusnya dibuat terpisah.

KETENTUAN

1. File scan formulir kuisisioner/data penilaian digabung dengan file data dukung indikator nomor 1 (satu) pada masing-masing hak;
2. File scan formulir kuisisioner /data Penilaian dan data dukung dalam format pdf;
3. Batas ukuran maksimum file data dukung per indikator yang dapat diunggah pada aplikasi KKP HAM sebesar 50 megabyte;
4. File data dukung indikator yang bersub misal indikator 1. a, b, c dan seterusnya dibuat terpisah.



STRUKTUR DOKUMEN



STRUKTUR DOKUMEN KKPHAM

KKPHAM
KAB/KOTA.....



1. Hak Atas Bantuan Hukum



Berisi 6 file pdf scan data dukung



2. Hak Atas Informasi



Berisi 4 file pdf scan data dukung



3. Hak Atas Turut Serta dlm
Pemerintahan



Berisi 6 file pdf scan data dukung



4. Hak Atas Keberagaman &
Pluralisme



Berisi 10 file pdf scan data dukung



5. Hak Atas Kependudukan



Berisi 11 file pdf scan data dukung



6. Hak Atas Kesehatan



Berisi 30 file pdf scan data dukung





7. Hak Atas Pendidikan



Berisi 20 file pdf scan data dukung



8. Hak Atas Pekerjaan



Berisi 11 file pdf scan data dukung



9. Hak Atas Lingkungan Baik dan Sehat serta Perumahan Layak



Berisi 14 file pdf scan data dukung



10. Hak Atas Perempuan dan Anak



Berisi 35 file pdf scan data dukung



Jateng
goyeng

ALWAYS THE BEST

REFORMASI
HUKUM

icare

PASTI Nyata

e! gov
Nyata



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

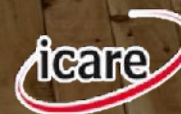
TERIMA KASIH



Jateng
gayeng

ALWAYS THE BEST

REFORMASI
HUKUM



PASTI Nyata

